

**ANALISIS SEBARAN PRIORITAS KETAHANAN PANGAN  
DI WILAYAH KARESIDENAN BESUKI**

***ANALYSIS OF DISTRIBUTION OF FOOD SECURITY PRIORITIES  
IN BESUKI RESIDENCY AREA***

**Aulia Nadhirah, Tia Sofiani Napitupulu\*, Amalia Dwi Marseva, Sumarlina**

Politeknik Negeri Jember, Jl Mastrip 164 Jember Jawa Timur

\*Email: tia.sofiani@polije.ac.id

(Diterima 23-05-2023; Disetujui 11-07-2023)

**ABSTRAK**

Pelaksanaan penelitian ini untuk menjawab tiga pertanyaan, antara lain: (1) mengukur skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Karesidenan Besuki, (2) memetakan sebaran wilayah prioritas rawan pangan di Karesidenan Besuki, dan (3) memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah kerawanan pangan. Penggunaan data sekunder yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Analisis skor Indeks Ketahanan Pangan menggunakan tujuh indikator yang diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek aksesibilitas pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Penetapan kelompok prioritas untuk wilayah kategori rawan mengacu pada cut-off point Indeks Ketahanan Pangan. Penetapan rekomendasi penanganan wilayah kategori rawan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) skor Indeks Ketahanan Pangan di wilayah Karesidenan Besuki adalah 85,28 dan skor ini termasuk dalam kategori tahan (prioritas kelima), (2) sebaran prioritas untuk wilayah kategori rentan di Besuki Wilayah pemukiman dibagi menjadi tiga kategori yaitu sangat rentan, rentan dan sedikit rentan, dan (3) terdapat program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya penanggulangan untuk daerah rawan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan pemerataan di seluruh daerah dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan sumber daya masing-masing daerah. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang terintegrasi dalam pelaksanaannya, agar kebijakan dapat berlangsung lebih terukur.

Kata kunci: ketahanan pangan, karesidenan besuki, strategi, prioritas

**ABSTRACT**

*The implementation of this research is to answer three questions, including: (1) measuring the score of the Food Security Index (IKP) in the Besuki Residency, (2) mapping the distribution of priority areas for food insecurity in the Besuki Residency, and (3) providing recommendations for overcoming food insecurity problems. The data used is secondary data collected from the publications of the Central Statistics Agency (BPS), the Health Service, and the Ministry of Home Affairs. Analysis of the score of the Food Security Index uses seven indicators that are classified into three aspects, namely aspects of food availability, aspects of food accessibility, and aspects of food utilization. The determination of priority groups for vulnerable category areas refers to the cut-off point of the Food Security Index. Determination of recommendations for handling the vulnerable category areas using quantitative and qualitative approaches. The results of the study showed that: (1) the score of the Food Security Index in Besuki Residency area is 85.28 and this score is included in resistant category (fifth priority), (2) the distribution of priorities for vulnerable category areas in Besuki Residency area is divided into three categories, namely very vulnerable, vulnerable and slightly vulnerable, and (3) there are programs that have been implemented by the East Java Provincial Government as an effort to overcome for vulnerable areas. However, in its implementation, it is still necessary to pay attention to the equity in all regions by considering the various conditions and resources of each region. In addition, there is a*

*need for integrated supervision in its implementation, so that the policy can take place more measurably.*

*Keywords: IKP; strategies; vulnerable; implementation*

## **PENDAHULUAN**

Pemenuhan pangan rumah tangga menjadi salah satu kebutuhan pokok yang kuantitas dan kualitasnya harus terjamin. Oleh karena itu, pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional dan global. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan mudah diakses serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2021, ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan (BKP, 2021). Pangan tidak hanya membutuhkan akses pangan semata, tetapi juga akses pangan yang memadai (Hadiprayitno, 2010).

Dengan kata lain, ketahanan pangan mencerminkan suatu kondisi dimana setiap orang setiap saat, baik secara fisik maupun ekonomi, memiliki

akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai dengan preferensinya. Sejalan dengan deklarasi World Summit tahun 2009 yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai akses bagi semua orang terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sehat (Von Braun, 2014). Kebijakan mengenai ketahanan pangan di negara berkembang merupakan isu kritis dan menjadi prioritas utama (Bahiru et al., 2023).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia masih rentan terhadap kelangkaan pangan akibat produksi yang fluktuatif. Indonesia masih rentan kekurangan pangan (Maun, 2022). Produk domestik komoditas pangan pokok seperti beras, jagung, ubi kayu, kedelai, dan gula di Indonesia cukup besar, namun Indonesia merupakan net importir dari semua komoditas tersebut (Peter, 2011). Pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia secara berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan salah satu

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu menghilangkan kelaparan (zero kelaparan) pada tahun 2030. UUD RI no. 11 Tahun 2020 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi. Dengan demikian, sistem informasi dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program pemerintah terkait upaya peningkatan ketahanan pangan di Indonesia.

Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan menyusun penilaian situasi ketahanan pangan berdasarkan serangkaian indikator yang dituangkan dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP diharapkan dapat dijadikan dasar untuk melakukan intervensi program baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga lebih terarah dan tepat sasaran. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2021 yang diterbitkan oleh Pusat Ketersediaan dan Rawan Pangan - Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian, dipilih sembilan indikator sebagai dasar penetapan IKP. Kesembilan indikator tersebut adalah rasio konsumsi

normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk makanan yang lebih dari 65% dari total pengeluaran, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, rata-rata lama sekolah anak perempuan di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap penduduk kepadatan, persentase balita pendek, dan angka harapan hidup saat lahir (BKP, 2021).

Terjadinya pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian dan sistem pangan global sehingga menimbulkan masalah ketahanan pangan yang cukup luas seperti lapangan kerja di bidang pertanian dan ketersediaan pangan, ketahanan pangan, tumbuhan dan hewan, serta gizi dan kesehatan manusia (Mardones et al., 2020). Penyebaran wabah COVID-19 memang tidak terkait langsung dengan pangan, namun *social distancing* selama pandemi menyebabkan banyak perubahan pola produksi dan distribusi pangan. Pembatasan pergerakan populasi global telah memengaruhi masalah pangan dunia, dan

mendorong perancangan ulang dan optimalisasi sistem untuk memanfaatkan sumber daya dari perspektif yang lebih berkelanjutan (Farcas et al., 2020). Selain itu, perancangan juga harus mempertimbangkan kondisi tiap daerah yang berbeda, baik dari sisi perkembangan wabah COVID-19 di daerah maupun kondisi dasar ketahanan pangan. Guncangan ekonomi seperti pandemi dan inflasi berdampak lebih serius pada negara dengan ketahanan pangan yang lebih rendah, dibandingkan dengan negara dengan tingkat ketahanan pangan yang lebih tinggi (Saboori et al., 2022). Oleh karena itu, upaya pemulihan pasca pandemi juga perlu memperhatikan analisis ketahanan pangan di setiap daerah.

Jawa Timur termasuk dalam kelompok provinsi dengan indeks ketahanan pangan klaster sedang (Ramadhan et al., 2021). Berdasarkan IKP 2021, seluruh kabupaten di Jawa Timur berada pada kelompok kawasan hijau (Kelompok 5 dan 6) dengan indeks ketahanan pangan terbaik. Namun, setiap kabupaten memiliki peringkat yang berbeda-beda dengan kisaran yang cukup luas. Beberapa di antaranya adalah empat kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki yang terdiri dari Kabupaten

Banyuwangi (peringkat 78), Kabupaten Bondowoso (peringkat 231), Kabupaten Jember (peringkat 201), dan Kabupaten Situbondo (peringkat 184) dari total 416 kabupaten (BKP, 2021). Karesidenan Besuki merupakan karesidenan terluar Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Pulau Bali. Dengan kata lain Karesidenan Besuki memiliki akses yang cukup jauh dari ibukota provinsi, namun menjadi salah satu jalur akses dan distribusi menuju Pulau Bali. Hal ini memperbesar kemungkinan besarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan di wilayah Karesidenan Besuki.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai sebaran prioritas ketahanan pangan di wilayah Karesidenan Besuki yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember dan Situbondo. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur skor indeks ketahanan pangan di wilayah Karesidenan Besuki, memetakan sebaran prioritas daerah rawan di wilayah Karesidenan Besuki, dan memberikan rekomendasi penanggulangan masalah kerawanan pangan di wilayah Karesidenan Besuki. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi awal mengenai indeks

ketahanan pangan di wilayah Karesidenan Besuki untuk membuat kebijakan terkini terkait pemulihan pasca pandemi di bidang ketahanan pangan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus - September 2022. Penelitian dilaksanakan pada empat wilayah di Karesidenan Besuki yaitu Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo.

Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data yang menjadi indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2021. Selain itu juga dilakukan studi pustaka baik dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun literatur lain yang terkait.

#### a. Penentuan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Ketersediaan data yang terbatas menyebabkan penelitian ini menggunakan 7 (tujuh) indikator dari total 9 (sembilan) indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2021 sehingga terdapat penyesuaian bobot dengan proporsi yang berimbang.

**Tabel 1. Bobot indikator kabupaten berdasarkan *Expert Judgement***

No.	Indikator	Bobot	Bobot Baru
<b>ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN</b>			
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar dan ubi ayu serta stok beras pemerintah daerah	0,300	0,342
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0,300</b>	<b>0,342</b>
<b>ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN</b>			
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,150	0,171
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075	-
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075	0,096
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0,300</b>	<b>0,267</b>
<b>ASPEK PEMANFAATAN PANGAN</b>			
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,050	-
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,150	0,160
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,050	0,060
8.	Persentase balita stunting	0,050	0,060
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,100	0,110
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0,400</b>	<b>0,110</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, 2022 (diolah)

Tabel 1 di atas merupakan indikator IKP 2021 untuk kabupaten beserta bobotnya. Selanjutnya adalah menghitung Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan standarisasi terhadap nilai indikator yang telah dikumpulkan dengan mengubah kedalam bentuk *z-score* dan *distance to scale* (1-100).
2. Hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang telah distandarisi dengan bobot indikator, Berikut rumus yang dapat digunakan:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

- i* : Indikator ke-1 hingga ke-9
- j* : Kecamatan ke-1 hingga 96
- Y<sub>j</sub>* : IKP Kecamatan ke-*j*
- a<sub>i</sub>* : Bobot masing-masing indikator ke-*i*
- X<sub>ij</sub>* : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-*i* di setiap kecamatan

Wilayah dengan nilai IKP yang lebih besar merupakan wilayah yang lebih tahan terhadap pangan dan berlaku sebaliknya.

b. Penentuan Kelompok Prioritas Daerah Rawan Pangan

Tahapan selanjutnya adalah mengelompokkan wilayah kecamatan yang ada di Karesidenan Besuki kedalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* IKP. *Cut off point* IKP merupakan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang telah distandarisi

dengan bobot indikator. Wilayah dengan pada kelompok prioritas 1 atau yang lebih besar nilai *cut off point* IKP nya merupakan wilayah yang lebih tahan terhadap pangan dan berlaku sebaliknya. Berikut merupakan Tabel 2 yang menggambarkan *cut off point* untuk wilayah kabupaten dan di wilayah Karesidenan Besuki.

Tabel 2. *Cut off point* wilayah kabupaten dan di wilayah Karesidenan Besuki

Kelompok IKP	Kabupaten	Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki	Kategori
1	<=41,52	<=65,39	Sangat rawan pangan
2	>41,52-51,42	>65,39-73,17	Rawan pangan
3	>51,42-59,58	>73,17-79,62	Agak rawan pangan
4	>59,58-67,75	>79,62-84,96	Agak tahan pangan
5	>67,75-75,68	>84,96-90,10	Tahan pangan
6	>75,68	>90,10	Sangat tahan pangan

c. Rekomendasi Penanggulangan Daerah Rawan Pangan

Berdasarkan nilai indikator pada penentuan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang telah diketahui, maka dapat disusun rekomendasi penanggulangan masalah rawan pangan di wilayah Karesidenan Besuki diantaranya melalui pendekatan:

- 1) Pendekatan Kuantitatif:
  - (a) *Operation Research*: Penerapan metode ilmiah untuk memecahkan masalah yang timbul terhadap penerapan kebijakan yang telah ada.
  - (b) *Benefit/Risk Analysis*: Analisis manfaat dari penerapan kebijakan yang telah ada.
- 2) Pendekatan Kualitatif: pertimbangan para ahli, sudut pandang dari para ahli melalui studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Kelompok Prioritas Daerah Rawan Pangan

Berdasarkan pengukuran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menggunakan tujuh dari sembilan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2021, skor IKP wilayah Karesidenan Besuki termasuk dalam kategori tahan pangan. Skor Indeks Ketahanan Pangan untuk wilayah ini adalah 85,28 yang termasuk dalam prioritas kelima. Letak Karesidenan Besuki yang berada paling timur pulau Jawa dan merupakan kabupaten yang cukup jauh dari pusat provinsi tidak banyak berpengaruh terhadap aspek ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Setiap penduduk di suatu daerah harus memiliki akses

pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari jika ingin disebut sebagai daerah aman pangan (Ali et al., 2017) (Fauzi, 2019) (Pujiati et al., 2020). Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Provinsi Jawa Timur bagian timur yang meliputi Kabupaten Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Situbondo, Bangkalan, Sampang dan Pamekasan memiliki ketahanan pangan sedang atau dapat digolongkan menjadi prioritas agak tahan dan tahan pangan (Masitoh & Ratnasari, 2016).

Hasil *cut-off point* di wilayah Karesidenan Besuki yang telah mendapatkan penyesuaian perubahan jumlah indikator menyebabkan perbedaan klasifikasi kelompok prioritas, namun rentang skor yang dihasilkan tidak terlalu jauh. Skor IKP tertinggi pada penelitian ini adalah Kabupaten Situbondo dengan skor IKP 88,61, termasuk dalam kategori tahan pangan atau termasuk dalam kelompok prioritas kelima. Kabupaten yang tergolong prioritas terendah di wilayah Karesidenan Besuki adalah Kabupaten Bondowoso dengan skor IKP 81,38 yaitu kategori agak tahan pangan atau termasuk dalam prioritas keempat. Kabupaten Bondowoso yang terletak di dataran tinggi memiliki ketersediaan dan akses pangan yang rendah. Berikut Tabel

3 yang menyajikan IKP di wilayah karesidenan Besuki.

**Tabel 3. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Wilayah Karesidenan Besuki**

No.	Kabupaten	IKP	Peringkat	Kategori	Prioritas
1.	Situbondo	88,61	1	Tahan Pangan	5
2.	Jember	86,09	2	Tahan Pangan	5
3.	Banyuwangi	85,04	3	Tahan Pangan	5
4.	Bondowoso	81,38	4	Agak Tahan Pangan	4
<b>Karesidenan Besuki</b>		<b>85,28</b>		<b>Tahan Pangan</b>	<b>5</b>

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2022

**a. Kabupaten Situbondo**

Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten dengan skor IKP tertinggi di wilayah Karesidenan Besuki. Nilai IKP Kabupaten Situbondo adalah 88,61. Skor

ini termasuk wilayah dengan kategori tahan pangan atau prioritas kelima. Secara rinci, Tabel 4 menyajikan skor IKP di Kabupaten Situbondo.

**Tabel 4. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Wilayah Kabupaten Situbondo**

Kecamatan	<i>i</i> <sub>1</sub>	<i>i</i> <sub>2</sub>	<i>i</i> <sub>4</sub>	<i>i</i> <sub>6</sub>	<i>i</i> <sub>7</sub>	<i>i</i> <sub>8</sub>	<i>i</i> <sub>9</sub>	IKP	Prioritas
Banyuglugur								92,38	6
Panji								91,01	6
Panarukan								90,85	6
Jangkar								90,80	6
Situbondo								90,34	6
Besuki								90,24	6
Asembagus								90,06	5
Bungatan								89,97	5
Suboh								89,86	5
Kapongan								89,66	5
Arjasa								89,14	5
Mangaran								88,04	5
Mlandingan								87,53	5
Banyuputih								87,49	5
Kendit								85,69	5
Jatibanteng								85,29	5
Sumber Malang								77,98	3
<b>Situbondo Regency</b>								<b>88,61</b>	<b>5</b>

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2022

Berdasarkan Tabel 4 tentang Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Kabupaten Situbondo yang memiliki 17 kecamatan terbagi menjadi 3 kategori. Kategori kabupaten yang sangat tahan pangan atau masuk dalam prioritas keenam adalah 35%. Kecamatan dengan kategori tahan

pangan atau masuk dalam prioritas kelima sebanyak 59% dan kecamatan dengan kategori agak rawan pangan atau masuk dalam prioritas ketiga sebanyak 6% atau setara dengan satu kecamatan yaitu Kecamatan Sumber Malang.



Sumber Malang merupakan kecamatan dengan skor IKP terendah di Kabupaten Situbondo. Nilai IKP Kecamatan Sumber Malang adalah 77,98. Rendahnya skor IKP di Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo disebabkan oleh tingginya skor indikator konsumsi normatif ( $i_1$ ), persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ( $i_2$ ), rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap penduduk kepadatan ( $i_7$ ), dan angka harapan hidup saat lahir ( $i_9$ ) yang berada pada prioritas kedua. Secara umum Kabupaten Situbondo beriklim kering, dimana masa kering di daerah tersebut lebih lama dibandingkan dengan musim hujan (Arifin & Tafakresnanto, 2019). Produktivitas tanaman padi lebih rentan terhadap kekeringan dibandingkan tanaman jagung (Hariyanti et al., 2019). Kekeringan pada budidaya jagung telah menurunkan hasil panen hampir 20% (Masruroh & Bowo, 2022). Data di atas menyebabkan penurunan keanekaragaman pangan di Kabupaten Situbondo. Keanekaragaman pangan yang cukup banyak menandakan tersedianya pangan yang cukup juga sehingga diharapkan ketahanan pangan juga terpenuhi (Gita, 2020).

Kecamatan lain di Kabupaten Situbondo menduduki prioritas kelima dan keenam, dengan skor mulai dari 92,38 untuk Kecamatan Banyuglugur hingga 85,29 untuk Kecamatan Jatibanteng. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Kabupaten Situbondo memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dikembangkan berupa strategi ketahanan pangan. Rekomendasi strategi yang ditawarkan adalah strategi diversifikasi atau Kabupaten Situbondo yang berada pada posisi yang baik dalam menjaga ketahanan pangannya namun akan menghadapi berbagai ancaman yang datang dari lingkungan eksternalnya. Kabupaten Situbondo memiliki kekuatan antara lain komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan, ketersediaan bahan pangan yang cukup, adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal, kondisi infrastruktur yang memadai dan adanya kelembagaan daerah yang khusus menangani ketahanan pangan. Sedangkan peluang yang dimiliki Kabupaten Situbondo adalah letak geografis yang strategis, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal, adanya jalan negara dan jalan provinsi, adanya landasan hukum dan kebijakan tentang peningkatan

pangan di Indonesia (Ristina & Hanim, 2014).

### b. Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan pusat Karesidenan Besuki. Kabupaten Jember memiliki 31 kecamatan.

Kabupaten Jember termasuk dalam kategori tahan pangan dengan skor IKP 86,09 atau termasuk dalam kelompok prioritas kelima. Berikut Tabel 5 yang menyajikan nilai IKP di Kabupaten Jember.

**Tabel 5. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Wilayah Kabupaten Jember**

Kecamatan	$i_1$	$i_2$	$i_4$	$i_6$	$i_7$	$i_8$	$i_9$	IKP	Prioritas
Ambulu								94.86	6
Sumbersari								93.84	6
Kencong								93.20	6
Puger								93.01	6
Kaliwates								91.66	6
Jenggawah								91.62	6
Semoro								91.30	6
Patrang								90.89	6
Gumukmas								88.48	5
Sukorambi								88.33	5
Rambipuji								88.18	5
Silo								87.78	5
Tempurejo								86.91	5
Sumberbaru								85.71	5
Umbulsari								85.27	5
Ajung								85.03	5
Tanggul								84.99	5
Wuluhan								84.28	4
Balung								84.05	4
Jombang								83.94	4
Kalisat								83.59	4
Mumbulsari								83.21	4
Ledokombo								82.76	4
Sumberjambe								82.60	4
Jelbuk								82.36	4
Arjasa								81.46	4
Bangsari								81.18	4
Sukowono								80.92	4
Panti								79.77	4
Mayang								79.61	3
Pakusari								77.86	3
<b>Jember Regency</b>								<b>86.09</b>	<b>5</b>

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Jember, sebanyak 26% dari total kecamatan masuk dalam kelompok prioritas keenam atau kecamatan sangat tahan pangan. Nilai IKP tertinggi yaitu 94,86 di Kecamatan Ambulu. Sebanyak 29% dari total kabupaten termasuk dalam kelompok prioritas kelima atau kabupaten yang tahan pangan. Sebanyak 39% dari total kabupaten termasuk dalam kelompok prioritas keempat atau agak tahan pangan. Sisanya 6% diklasifikasikan sebagai kabupaten yang agak rawan pangan.

Kecamatan dengan kategori agak rawan atau termasuk kelompok prioritas ketiga di Kabupaten Jember adalah Kecamatan Mayang dan Kecamatan Pakusari. Kecamatan Mayang memiliki skor IKP 79,61. Indikator yang mempengaruhi skor IKP di Kecamatan Mayang adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ( $i_2$ ) dan rumah tangga yang tidak memiliki akses air bersih ( $i_6$ ) yang termasuk dalam kelompok prioritas kedua. Rasio penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ( $i_2$ ) tertinggi terdapat di kecamatan Sumberjambe, Arjasa, dan Sukowono, namun secara keseluruhan ketiga kecamatan tersebut

masih tergolong kecamatan yang agak tahan. Kabupaten Jember termasuk kabupaten dengan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (di atas rata-rata) sangat rendah, tetapi banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (di atas rata-rata) (BPS, 2021a).

Kecamatan Pakusari memiliki skor IKP sebesar 77,86. Kecamatan Pakusari merupakan kecamatan terendah yang agak rawan pangan di wilayah Kabupaten Jember. Indikator yang paling mempengaruhi rendahnya skor IKP Kecamatan Pakusari adalah persentase balita stunting ( $i_8$ ) yang tergolong prioritas pertama. Stunting merupakan kejadian multifaktorial dan proses akumulatif yang terjadi selama masa kehamilan, masa kanak-kanak, dan sepanjang siklus kehidupan. Beberapa penyebab langsung stunting adalah malnutrisi kronis dan pola asuh yang tidak tepat. Stunting berdampak buruk pada perkembangan seperti kemampuan kognitif, rentan terhadap penyakit, dan rendahnya daya saing. Terdapat beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan stunting, antara lain sanitasi lingkungan yang buruk, bayi berat lahir rendah (BBLR), pemberian ASI eksklusif, serta waktu dan komposisi makanan

pendamping yang tidak tepat (Nadiyah et al., 2014; Khasanah et al., 2016). Hasil penelitian menyebutkan bahwa terjadinya stunting pada balita merupakan salah satu faktor penyebab ketahanan pangan rumah tangga. Anak yang berada di daerah dengan ketahanan pangan rendah berisiko 2,62 kali lebih besar untuk menderita

stunting (Masrin et al., 2016). Indikator selanjutnya yang mempengaruhi rendahnya skor IKP di Kecamatan Pakusari adalah rasio konsumsi normatif per kapita ( $i_1$ ), persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ( $i_2$ ) dan rumah tangga tanpa akses air bersih ( $i_6$ ) yang tergolong prioritas kedua.

**Tabel 6. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Wilayah Kabupaten Banyuwangi**

Kecamatan	$i_1$	$i_2$	$i_4$	$i_6$	$i_7$	$i_8$	$i_9$	IKP	Prioritas
Genteng								95.65	6
Banyuwangi								95.19	6
Muncar								93.81	6
Blimbingsari								92.20	6
Srono								91.63	6
Sempu								90.70	6
Songgon								88.53	5
Glenmore								87.63	5
Gambiran								87.55	5
Siliragung								86.57	5
Wongsorejo								85.80	5
Cluring								85.14	5
Kalipuro								85.09	5
Singojuruh								84.73	4
Purwoharjo								84.39	4
Bangorejo								83.82	4
Kalibaru								83.44	4
Rogojampi								82.66	4
Kabat								82.51	4
Pesanggaran								81.03	4
Glagah								80.20	4
Giri								80.08	4
Tegalsari								79.54	3
Tegaldlimo								69.18	2
Licin								68.99	2
<b>Kabupaten Banyuwangi</b>								<b>85.04</b>	<b>5</b>

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2022

### c. Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi memiliki 25 kecamatan dengan luas wilayah

5.782,5 km<sup>2</sup> (BPS, 2022). Tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Banyuwangi termasuk kategori Tahan

Pangan. Tabel 6 menunjukkan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Banyuwangi.

Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi secara umum dapat dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu Sangat Tahan, Tahan, Sedikit Tahan, Sedikit Rentan, dan Rentan. Skor IKP per kecamatan di Kabupaten Banyuwangi berkisar antara 68,99 hingga 95,65. Daerah yang menduduki peringkat pertama dengan skor IKP tertinggi adalah Kabupaten Genteng. Sedangkan Kecamatan Licin merupakan daerah dengan skor IKP terendah. Apalagi skor IKP di Kabupaten Banyuwangi adalah 85,04 yang masuk dalam kategori tahan.

Kabupaten Tegalsari memiliki skor IKP 79,54 yang masuk dalam kategori rentan. Dilihat dari indikator yang digunakan, indikator rasio penduduk miskin di Kabupaten Tegalsari termasuk dalam prioritas pertama. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ( $i_2$ ) diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Semakin tinggi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah, maka nilai rasio penduduk miskin akan

semakin tinggi. Dalam hal penelitian yang dilakukan oleh Wight et al. (2014) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kemiskinan dan kerawanan pangan. Kemiskinan dan kerawanan pangan secara intrinsik terkait karena rumah tangga miskin seringkali kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengakses makanan bergizi yang cukup untuk hidup aktif dan sehat (Hjelm et al., 2016). Insiden kerawanan pangan meningkat seiring dengan penurunan rasio pendapatan terhadap kebutuhan (Wight et al., 2014).

Indikator lain yang penting untuk diperhatikan adalah indikator Angka Kematian Bayi (AKB), yang termasuk dalam prioritas kedua. Kerawanan pangan berkorelasi positif dengan kematian bayi (Campbell et al., 2009)(Vu et al., 2022). Hasil penelitian yang berjudul Hubungan kerawanan pangan rumah tangga dengan kematian neonatal, bayi, dan balita pada keluarga di pedesaan Indonesia menunjukkan bahwa kerawanan pangan rumah tangga yang lebih besar dapat menandakan risiko kematian bayi dan anak yang lebih tinggi (Campbell et al., 2009).

Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Licin termasuk dalam kategori rawan pangan, dengan skor IKP

masing-masing 69,18 dan 68,99. Jika dilihat dari skor masing-masing indikator di Kecamatan Tegaldlimo terdapat tiga indikator yang perlu diperhatikan yaitu indikator rumah tangga tanpa akses air bersih ( $i_6$ ) (prioritas pertama), rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk ( $i_7$ ) (prioritas pertama), dan persentase balita pendek ( $i_8$ ) (prioritas kedua). Sedangkan di Kecamatan Licin terdapat dua indikator yang masuk dalam prioritas pertama (persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ( $i_2$ ) dan rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk ( $i_7$ ) dan dua indikator yang termasuk dalam pada prioritas kedua (rumah tangga tanpa akses air bersih ( $i_6$ ) dan angka harapan hidup saat lahir ( $i_9$ )).

Dilihat dari hasil analisis pada tabel 6 diketahui terdapat lima kelompok prioritas di Kabupaten Banyuwangi yaitu prioritas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Daerah dengan prioritas keempat (agak tahan pangan) memiliki persentase terbesar (39,13%) dibandingkan empat kelompok prioritas lainnya. Selanjutnya, persentase terbesar diikuti oleh area prioritas kelima (tahan pangan) sebesar 30,43%, prioritas keenam (sangat tahan pangan) sebesar

26,09%, prioritas kedua (rawan pangan) sebesar 8,70%, dan prioritas ketiga (agak rawan pangan) sebesar 4,35 %. Meskipun sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyuwangi masuk dalam prioritas keempat, kelima, dan keenam (95,65% dari total persentase), namun masih terdapat wilayah yang termasuk dalam kategori agak rawan dan rawan pangan. Ketiga daerah tersebut adalah Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Tegaldlimo, dan Kecamatan Licin. Alasan ketiga wilayah tersebut masuk dalam kelompok wilayah kategori rawan pangan adalah karena beberapa indikator sebagaimana disebutkan dalam pembahasan IKP di atas masuk dalam prioritas pertama dan kedua (rawan dan sangat rawan pangan). Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung Pulau Jawa. Artinya, akses menuju kawasan tersebut paling jauh. Kebijakan yang diterapkan untuk mengubah status tahan pangan, tidak hanya memperhatikan peningkatan ketersediaan pangan tetapi juga distribusi pangan harus menjangkau seluruh penduduk (Hossain et al., 2020).

#### **d. Kabupaten Bondowoso**

Kabupaten Bondowoso secara administratif terbagi menjadi 23 kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019.

Berdasarkan elevasi (ketinggian di atas permukaan laut), wilayah Kabupaten Bondowoso dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pegunungan dan perbukitan (44,4%), dataran rendah (30,7%), dan dataran tinggi (24,9%) (BPS, 2021b). Kabupaten Bondowoso berada di tengah-tengah kawasan Karesidenan Besuki. Meskipun hal tersebut tidak menjadikan kawasan tersebut strategis karena tidak dilalui oleh jalan negara yang menghubungkan antar provinsi dan tidak memiliki laut. Kondisi ini membuat Kabupaten Bondowoso sulit berkembang dibandingkan kabupaten lain di Jawa Timur (Badan Pemeriksa Keuangan, 2015).

Skor IKP per kecamatan di Kabupaten Bondowoso berkisar antara 49,78 hingga 96,26. Kabupaten Bondowoso merupakan daerah dengan skor IKP tertinggi (peringkat pertama), sedangkan kabupaten Ijen merupakan daerah dengan skor IKP terendah. Rata-rata skor IKP di Kabupaten Bondowoso adalah 81,38 yang termasuk dalam kategori agak tahan pangan. Nilai, kategori dan prioritas IKP per kecamatan di Kabupaten Bondowoso disajikan pada Tabel 5.

Kabupaten Ijen merupakan daerah dengan skor IKP terendah yaitu 49,78

dan merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam kategori sangat rawan pangan. Berdasarkan tujuh indikator penghitungan IKP, terdapat dua indikator yang termasuk dalam prioritas pertama penanganan kerawanan pangan, yaitu indikator Rasio konsumsi normatif per kapita ( $i_1$ ), persentase balita pendek ( $i_8$ ) dan harapan hidup saat lahir ( $i_9$ ). Ketiga indikator tersebut membuat skor IKP di Kabupaten Ijen sangat rendah.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh pola makan dengan kejadian stunting balita usia 24-59 bulan di Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso. Praktik pemberian makan adalah perilaku ibu terhadap balita yang berkaitan dengan pemberian kolostrum, makanan/minuman pra lakteal, pemberian ASI eksklusif, frekuensi makan dalam sehari, pemberian makanan jajan dan variasi makanan dalam satu kali makan yang erat hubungannya dengan ketersediaan pangan atau konsumsi normatif. penduduk per kapita (Fadilah et al., 2020).

Kecamatan Pujer memiliki skor IKP 70,74 yang termasuk dalam kategori rentan. Indikator rumah tangga tanpa akses air bersih ( $i_6$ ) di Kabupaten Bondowoso masuk dalam prioritas

pertama. Kemudian ada juga tiga indikator yang termasuk dalam prioritas kedua, yaitu indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (*i<sub>2</sub>*), persentase anak balita yang pendek (*i<sub>8</sub>*) dan angka harapan hidup saat lahir (*i<sub>9</sub>*). Hasil penelitian stunting di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tidak dipengaruhi oleh asupan makanan (konsumsi energi dan konsumsi protein), riwayat penyakit infeksi, riwayat BBLR, dan ASI eksklusif (Susanti & Rohmawati, 2021). Keempat indikator tersebut secara langsung menyebabkan perhitungan skor IKP di Kecamatan Pujer menjadi rendah.

Indikator yang paling dominan mempengaruhi prioritas ketahanan pangan di Kabupaten Bondowoso adalah rumah tangga tanpa akses air bersih (*i<sub>6</sub>*) yang menjadi prioritas pertama di 6 kecamatan di Bondowoso. Pada tahun 2017, hanya 56,16% dari total penduduk di Kabupaten Bondowoso yang menggunakan air minum yang aman untuk dikonsumsi (Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2021). Balita yang berasal dari keluarga dengan air minum dari sumber air yang tidak terlindungi memiliki risiko 1,35 kali lebih besar untuk menjadi stunting (Oktarina & Sudiarti, 2013).

Kelompok prioritas daerah rawan pangan di Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi enam kelompok prioritas. Kelompok prioritas keempat adalah kelompok dengan persentase tertinggi (52,17%) yaitu Kecamatan Grujungan sampai Kecamatan Botolinggo. Kemudian diikuti kelompok prioritas ketiga (17,39%) yaitu Kecamatan Wonosari hingga Kecamatan Prajekan. Kabupaten prioritas kelima (13,04%) adalah Kabupaten Tegalampel hingga Pakem dan prioritas keenam (8,70%) adalah Kabupaten Bondowoso dan Tenggarang. Kabupaten Bondowoso sendiri di Karesidenan Besuki termasuk dalam kelompok prioritas keempat dalam penanganan ketahanan pangan.

Kelompok prioritas daerah rawan pangan di Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi enam kelompok prioritas. Kelompok prioritas keempat adalah kelompok dengan persentase tertinggi (52,17%). Kemudian diikuti kelompok prioritas ketiga (17,39%), prioritas kelima (13,04%), prioritas keenam (8,70%), prioritas kedua (4,35%), dan prioritas pertama (4,35%). Kabupaten Bondowoso termasuk dalam kelompok prioritas keempat.



**Tabel 7. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Wilayah Kabupaten Bondowoso**

Kecamatan	$i_1$	$i_2$	$i_4$	$i_6$	$i_7$	$i_8$	$i_9$	IKP	Prioritas
Bondowoso								96.26	6
Tenggarang								90.60	6
Tegalampel								88.54	5
Wringin								88.14	5
Pakem								87.35	5
Grujugan								84.62	4
Klabang								84.32	4
Tlogosari								84.10	4
Tamanan								84.00	4
Curahdami								83.91	4
Maesan								82.94	4
Sumber Wringin								82.48	4
Sukosari								81.85	4
Taman Krocok								81.46	4
Tapen								81.09	4
Jambesari Darus								81.02	4
Sholah								79.65	4
Botolinggo								78.48	3
Wonosari								78.03	3
Cermee								77.93	3
Binakal								74.38	3
Prajekan								70.74	2
Pujer								49.78	1
Ijen									
<b>Bondowoso Regency</b>								81.38	4

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2022

Berdasarkan kelompok prioritas daerah rawan per tiap kabupaten, terdapat enam kabupaten yang penting untuk diperhatikan karena termasuk dalam kelompok prioritas pertama, kedua, dan ketiga (kategori sangat rawan pangan, rawan pangan, dan agak rawan pangan). Terdapat empat wilayah yang masuk dalam kategori agak rawan (prioritas ketiga), yaitu Kecamatan Wonosari, Kecamatan Cermee, Kecamatan Binakal, dan Kecamatan Prajekan. Kecamatan

Pujer termasuk dalam kategori daerah rawan pangan (prioritas kedua). Sedangkan Kabupaten Ijen termasuk dalam kategori sangat rawan pangan. Faktor yang menyebabkan daerah tersebut masuk dalam kelompok prioritas daerah rawan pangan adalah karena terdapat beberapa indikator penghitungan IKP di kabupaten tersebut yang memiliki skor rendah.

## 2. Rekomendasi Penanggulangan Daerah Rawan Pangan

Terwujudnya ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang setiap saat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelaksanaan tugas langsung kepada masyarakat bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara cukup, baik dari segi jumlah, mutu, keamanan, gizi, pemerataan dan keterjangkauan serta keberlanjutan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, setiap pemerintah daerah wajib menyusun program dan sasaran terkait ketahanan pangan dan gizi guna mewujudkan ketahanan pangan nasional secara global. Penyusunan program dan target tentunya dapat disesuaikan dengan Indeks Ketahanan Pangan masing-masing daerah.

Pemerintah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020

tentang pengentasan kemiskinan, merealisasikan enam strategi penanggulangan kemiskinan yaitu berupa pengembangan sistem perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pengembangan inklusivitas, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan (Hidayati, 2018). Perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi menggunakan pendekatan campuran teknokratis, partisipatif *top-down/bottom-up*. Pendekatan perencanaan ini juga harus didukung penuh oleh pemerintah, pelaku usaha dan kelompok masyarakat penerima manfaat. Faktor pendukung dalam pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi antara lain potensi sumber daya alam berupa hasil pertanian, ketersediaan dana/anggaran dari pusat, dukungan sumber daya manusia (Widodo et al., 2013).

Masalah ketahanan pangan di Kabupaten Jember memerlukan peran penting dari pemerintah dalam membuat kebijakan pola konsumsi masyarakat. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember antara lain: (1)

Kebijakan jangka pendek berupa pemberian bantuan kredit di bidang pertanian untuk meningkatkan motivasi pelaku agribisnis agar dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga petani, dan (2) Kebijakan jangka panjang berjangka, berupa jaminan bagi petani jika kemungkinan terburuk gagal panen terjadi di lahan petani (Malik et al., 2019).

Pemerintah Kabupaten Bondowoso bekerjasama dengan GAIN (*Global Alliance for Improved Nutrition*) dengan skema paradiplomasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga menjamin kesejahteraan dan gizi masyarakat di Kabupaten Bondowoso melalui pemberian hibah kepada BADUTA program 2.0. Penanganannya pada aspek di bidang perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan remaja serta peningkatan akses makanan bergizi (Januarfitra & Kurniawati, 2022). Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi masalah stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Bondowoso.

Strategi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo antara lain peningkatan SDM aparatur pemerintah dalam mendukung penerapan teknologi pengolahan pangan lokal,

menjadikan kebijakan pangan yang terintegrasi dengan pemerintah daerah sebagai peran utama dalam upaya pengendalian harga bahan pokok dan kondisi lain yang mempengaruhi ketidakstabilan ketiga sub sistem ketahanan pangan, dan merangkul organisasi pendukung sosialisasi teknologi pengembangan pangan lokal (Ristina & Hanim, 2014).

Rekomendasi dari implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya adalah bahwa dalam pelaksanaan program dan kebijakan perlu adanya pemerataan di seluruh daerah dengan memperhatikan berbagai kondisi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang terintegrasi dalam pelaksanaannya, agar kebijakan dapat berlangsung secara lebih terukur.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan, antara lain:

1. Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di wilayah Karesidenan Besuki adalah 85,28 yang termasuk kedalam kategori tahan pangan dan pada prioritas kelima. Kabupaten

- Situbondo, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai IKP masing-masing 88,61; 86,09 dan 85,04 yang termasuk kedalam kategori tahan pangan atau prioritas kelima. Sedangkan Kabupaten Bondowoso mendapatkan nilai IKP yaitu sebesar 81,38 dan tergolong kedalam kategori agak tahan pangan atau prioritas keempat.
2. Sebaran prioritas daerah rawan pangan di wilayah Karesidenan Besuki terbagi menjadi 3 kategori yaitu sangat rawan pangan, rawan pangan dan agak rawan pangan. Daerah yang termasuk kategori sangat rawan pangan adalah Kecamatan Ijen di Kabupaten Bondowoso. Daerah dengan kategori rawan pangan terdapat 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tegaldlimo dan Licin di Kabupaten Banyuwangi, serta Pujer di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan kategori agak rawan pangan terdapat 8 kecamatan yaitu kecamatan Tegalsari di Kabupaten Banyuwangi, kecamatan Wonosari, Cermee, Binakal dan Prajekan di Kabupaten Bondowoso, kecamatan Mayang dan Pakusari di Kabupaten Jember serta Kecamatan Sumber Malang di Kabupaten Situbondo.
  3. Terdapat program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya dalam menanggulangi daerah rawan pangan, namun dalam pelaksanaannya masih perlu memperhatikan pemerataan pada seluruh wilayah dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Selain itu perlu adanya pengawasan terpadu dalam penerapannya, sehingga kebijakan tersebut dapat berlangsung secara lebih terukur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. S. S., Majika, A., & Salman, D. (2017). Food Consumption and Production in Tempe Lake, South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Asian Rural Studies*, 1(1), 43–52.
- Arifin, Z., & Tafakresnanto, C. (2019). Pengelolaan pola tanam berbasis kedelai dan jagung di lahan kering. *Buletin Palawija*, 17(2), 83–93.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). *Badan Pemeriksa Keuangan*. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bondowoso/>
- Bahiru, A., Senapathy, M., & Bojago, E. (2023). Status of household food security, its determinants, and coping strategies in the Humbo district, Southern Ethiopia. *Journal of Agriculture and Food Research*, 11(100461), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jafr.2022.100461>
- BKP. (2021). *Indeks Ketahanan Pangan*

2021. Badan Ketahanan Pangan.
- BPS. (2021a). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember 2020*.
- BPS. (2021b). Kabupaten Bondowoso dalam Angka. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso*.
- Campbell, A. A., Pee, S. de, Sun, K., Kraemer, K., Lyman, A. T., Pfanner, R. M., Sari, M., Akhter, N., Bloem, M. W., & Semba, Richard, D. (2009). Relationship of Household Food Insecurity to Neonatal, Infant, and Under-Five Child Mortality among Families in Rural Indonesia. *Food and Nutrition Bulletin*, 30(2), 112–119.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. (2021). *Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso 2021*. Bondowoso: Bondowoso District Health Office.
- Fadilah, S. N. N., Ningtyias, F. W., & Sulistiyani, S. (2020). *Tinggi Badan Orang Tua, Pola Asuh, dan Kejadian Diare Sebagai Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Balita di Kabupaten Bondowoso (Height of Parents, Parenting Style, and Diarrhea as the Stunting Risk Factor of Toddler in Bondowoso District)*.
- Farcas, A. C., Galanakis, C. M., Socaciu, C., Pop, O. L., Tibulca, D., Paucean, A., Jimborean, M. A., Fogarasi, M., Salanta, L. C., & Tofana, M. (2020). Food Security during the Pandemic and the Importance of the Bioeconomy in the New Era. *Sustainability*, 13(1), 150.
- Fauzi, M. (2019). Pemetaan ketahanan pangan pada badan koordinasi wilayah I Jawa Barat. *Jurnal Industri Pertanian*, 1(1).
- Gita, R. S. D. (2020). Keragaman Konsumsi Pangan Pokok Alternatif Masyarakat Kabupaten Jember. *Bioma: Jurnal Biologi Dan Pembelajaran Biologi*, 5(1), 42–51.
- Hadiprayitno, I. I. (2010). Food security and human rights in Indonesia. *Development in Practice*, 20(1), 122–130.  
<https://doi.org/10.1080/09614520903447437>
- Hariyanti, K. S., June, T., Koesmaryono, Y., Hidayat, R., Pramudia, A., & Balitklimat, B. (2019). *Penentuan waktu tanam dan kebutuhan air tanaman padi, jagung, kedelai dan bawang merah di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur*.
- Hjelm, L., Mathiassen, A., & Wadhwa, A. (2016). Measuring Poverty for Food Security Analysis: Consumption-Versus Asset-Based Approaches. *Food and Nutrition Bulletin*, 37(3), 275–289.
- Hossain, M. B., Long, M. A., & Stretesky, P. B. (2020). Welfare state spending, income inequality and food insecurity in affluent nations: a cross-national examination of OECD countries. *Sustainability*, 13(1), 324.
- Januarfitra, R. D., & Kurniawati, D. E. (2022). Upaya Reduksi Stunting pada BADUTA 2.0 melalui Kerja Sama antara Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Swiss dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(2), 506–520.
- Khasanah, D. P., Hadi, H., & Paramashanti, B. A. (2016). Waktu pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) berhubungan dengan kejadian stunting anak usia 6-23 bulan di Kecamatan Sedayu. *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)*, 4(2), 105–111.
- Malik, A., Wibisono, Y., & Iskandar, R. (2019). Analisis Ketahanan Pangan

- Kabupaten Jember. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Mardones, F. O., Rich, K. M., Boden, L. A., Moreno-Switt, A. I., Caipo, M. L., Zimin-Veselkoff, N., Alateeqi, A. M., & Baltenweck, I. (2020). The COVID-19 pandemic and global food security. *Frontiers in Veterinary Science*, 7, 578508.
- Masitoh, F., & Ratnasari, V. (2016). Pemodelan status ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan metode regresi probit biner. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 5(2).
- Masrin, M., Paratmanitya, Y., & Aprilia, V. (2016). Ketahanan pangan rumah tangga berhubungan dengan stunting pada anak usia 6-23 bulan. *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)*, 2(3), 103–115.
- Masruroh, D., & Bowo, C. (2022). Analisis Indeks Kekeringan Metode Standardized Precipitation Index (SPI) dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Padi dan Jagung. *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, 9(2), 277–284.
- Maun, J. (2022). Indonesia's Food Security Challenges: How Food SOE Optimizes its Role? *Research Horizon*, 2(3), 394–401.
- Nadiyah, N., Briawan, D., & Martianto, D. (2014). Faktor risiko stunting pada anak usia 0—23 bulan di Provinsi Bali, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 9(2).
- Oktarina, Z., & Sudiarti, T. (2013). Faktor risiko stunting pada balita (24—59 bulan) di sumatera. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 8(3), 177–180.
- Peter, W. (2011). *Food Security vs. Food Self-Sufficiency: The Indonesian Case*.
- Pujiati, S., Pertiwi, A., Silfia, C. C., Ibrahim, D. M., & Hafida, S. H. (2020). Analysis of Availability, Affordability and Utilization of Food in Supporting the Achievement of Community Food Security in Central Java Province. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(2).
- Ramadhan, A., Prawita, K., Izzudin, M. A., & Amandha, G. (2021). Analisis strategi dan klasterisasi ketahanan pangan nasional dalam menghadapi pandemi covid-19. *Teknologi Pangan: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*, 12(1), 110–122.
- Ristina, L., & Hanim, A. (2014). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)*, 7(1), 17–23.
- Saboori, B., Radmehr, R., Zhang, Y. Y., & Zekri, S. (2022). A new face of food security: A global perspective of the COVID-19 pandemic. *Progress in Disaster Science*, 16(100252), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2022.100252>
- Susanti, I. D., & Rohmawati, N. (2021). Determinan Kejadian Stunting pada Balita Usia 24-59 Bulan di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Kesehatan*, 9(3).
- Von Braun, J. (2014). Food and nutrition security the concept and its realization. *Bread and Brain, Education and Poverty Pontifical Academy of Sciences, Scripta Varia*, 125.
- Vu, L. C., Way, V., & Spangler, J. (2022). The Correlation between Food Insecurity and Infant Mortality in North Carolina. *Public Helath Nutr.*, 25(4), 1038–1044. <https://doi.org/10.1017/S13689800>

- 2200026X
- Widodo, H., Pratiwi, R. N., & Saleh, C. (2013). Perencanaan pembangunan distribusi dan akses pangan masyarakat (studi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16(4), 223–232.
- Wight, V., Kaushal, N., Waldfogel, J., & Garfinkel, I. (2014). Understanding the Link between Poverty and Food Insecurity among Children: Does the Definition of Poverty Matter? *J Child Poverty*, 20(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/10796126.2014.891973>